

MANAJEMEN PENDIDIKAN PEMBINAAN ANAK JALANAN

Oleh : Mundilarno¹⁾

ABSTRACT

Human resources quality in the future depended on the quality of the young generation now. But in Indonesia since five years later there are men, women, and children work as beggar and or street musician asked for money in the streets. The shortage of the finance of the government through and the economic crisis to be predicted as the most importance factor to make the community street problem to be more complicated. How ever this problems must be overcome if Indonesian would not have the loss generation. Street children can be divided in to four groups of age: the under 5 years old, primary school age, junior high school age, and senior years school age. We also make the street children in to two groups. The first group consist of children who are still as student both in the level of the primary school (SD) or junior high school (SLTP) student and a group that consist of no student children.

The research of the street children problems done along the street of Yogyakarta city. Some information also found by interview with public figure and head office of social department of Yogyakarta province. There are four prime factor, which make boy and girls to be street children that are economic problems, friend influence, forced by parent, and laziness. Based on this factors some approaches must be considered to overcome the street children problem especially in the perspective of education.

¹⁾ Dosen DPK pada STTKD Yogyakarta

The physical aspect of road may be made in order mismatch for the lazy group of street children. In other words the physical condition and road situation must be made to make children boring and finance aid of people must be given to street children that caused by economic problems. Skill training programs may overcome the problem of the school drop out children. Coordination among institutions especially with the high education institutions must be done to overcome the finance problems and to make the education management of the street children to be systematic.

Key words : The Laziness factor, roads' physical design, educative approach integrated.

PENDAHULUAN

Telah menjadi keyakinan umum bahwa masa depan suatu bangsa termasuk bangsa Indonesia ditentukan oleh kualitas generasi muda saat ini. Di samping itu, kualitas SDM termasuk para generasi mudanya ditentukan oleh mutu pendidikan yang ada. Sebagai sebuah sistem, pendidikan ditentukan oleh banyak faktor termasuk yang berkaitan dengan kemampuan pendanaan oleh pemerintah dan masyarakat. Krisis ekonomi yang sampai saat ini terasa masih melanda bangsa Indonesia membuat jumlah penduduk miskin diperkirakan mencapai 40 juta orang. Kenyataan tersebut diyakini banyak mempengaruhi kemampuan di dalam membiayai pendidikan yang berkualitas, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Keadaan ekonomi yang serba sulit diduga mempengaruhi sebagian besar masyarakat memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok daripada kebutuhan lainnya, termasuk menyangkut pendidikan. Berkaitan

dengan aspek fisik maupun psikhis (Soelaeman, 1985: 17) anak berada di dalam masa pertumbuhan, dan secara ekonomis anak dalam kondisi lemah. Dengan kata lain, anak memiliki hak untuk tumbuh atau ditumbuhkan dan berkembang atau dikembangkan, atau dididik.

Sejalan dengan ide “tri pusat pendidikan” yang telah lama disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, kesempatan maupun perlindungan bagi anak tersebut tentu saja berasal terutama dari pihak orang tua. Namun demikian, dengan keterbatasan di pihak orang tua, hak-hak anak yang seharusnya ditunaikan oleh keluarga kemungkinan besar tidak dapat diperoleh. Orang tua yang tidak mampu secara ekonomis, tingkat pendidikan rendah, keterampilan kurang, dan apalagi kurang peduli terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku, diduga akan melakukan pekerjaan apa saja demi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pekerjaan orang tua seperti sebagai pengamen dan atau peminta-minta di jalan yang termasuk kurang terpuji kemungkinan besar akan ditiru oleh anak-anak mereka.

Orang tua yang mengamen dan atau meminta-minta di jalan tersebut diyakini sebenarnya memiliki potensi yang tidak dimanfaatkan atau dikembangkan untuk kegiatan produktif. Dengan kata lain, perasaan tidak berdaya serta sikap dan perilaku pasrah dan malas (Pujiwati Sayoga, 1985: 25) diwariskan oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Proses pewarisan budaya miskin tersebut dimulai pada saat anak masih kecil (balita), anak diajak dengan digendong oleh orang tuanya. Setelah menginjak usia sekitar 10-an tahun, anak diajak dan langsung praktik mengamen dan atau meminta-minta di jalan di bawah pengawasan orang tua. Pada tahap selanjutnya setelah anak berusia sekitar 15 tahun atau lebih, anak sudah dapat mandiri menjadi anak jalanan dan melakukan pekerjaan mengamen dan atau meminta-minta di jalan.

Fenomena anak jalanan muncul sejak krisis ekonomi pada tahun 1997 dan sampai saat ini jumlahnya terlihat tidak berkurang. Apabila tidak mendapat perhatian dikawatirkan kecemasan akan hilangnya generasi (*lost generation*) bagi bangsa Indonesia akan menjadi kenyataan. Bahkan, menurut Dinas Sosial DIY (2002), di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 1.800 anak jalanan sehingga seluruh Indonesia diperkirakan dapat mencapai lebih dari satu juta orang.

Sampai saat ini, pemerintah maupun beberapa LSM telah berusaha memecahkan masalah anak jalanan tersebut. Namun demikian, menurut Menteri Sosial (2003) biaya yang cukup besar tidak mampu memecahkan masalah secara signifikan. Kekurangberhasilan tersebut diduga berkaitan dengan metode, pendekatan, ataupun sistem yang ditempuh kurang sesuai. Oleh karena itu, penelitian yang bertujuan mengungkap karakteristik, faktor penyebab, keinginan, harapan, pihak-pihak yang terlibat, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan anak jalanan ini dirasa perlu. Dengan demikian, kajian ini diyakini bermanfaat bagi beberapa pihak, di antaranya pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi, para tokoh dan warga masyarakat demi terbentuknya program pembinaan anak jalanan yang sistematis, efektif, dan efisien.

BEBERAPA KONSEPSI TENTANG ANAK JALANAN

Anak jalanan sering dipandang sebagai salah satu fenomena kehidupan di kota-kota besar. Anak jalanan merupakan label yang ditujukan kepada setiap anak yang melakukan aktivitas di perempatan jalan, pasar, terminal, dan tempat-tempat umum lainnya. Pada prinsipnya anak jalanan menghabiskan waktu sehari-hari atau melakukan aktivitas

terutama mencari uang di jalanan, baik sebagai pengamen, peminta-minta, penyemir sepatu, pedagang asongan, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, anak jalanan sering dipandang sebagai simbol kemiskinan atau masalah sosial lainnya, serta kelompok masyarakat pinggiran dan tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Kehidupan anak jalanan senantiasa terus bergulat melawan penderitaan, kelaparan, ketidakadilan, keterasingan, dan diskriminasi (Suswandari, 2000: 2). Di samping itu, anak jalanan dipandang sebagai sumber bencana dan timbulnya berbagai masalah sosial yang mengancam ketenteraman maupun ketertiban masyarakat, serta merusak pemandangan dan keindahan kota.

Kecuali kondisi dan persepsi tersebut, anak jalanan dapat diartikan ke dalam dua istilah (Haba dalam Suswandari, 2000: 18). Yang pertama, *children on the street* yaitu anak yang bekerja di jalanan dan masih tinggal bersama orang tua, keluarga, atau teman-temannya dan jalan bagi anak kelompok ini dijadikan sebagai tempat mencari nafkah. Kelompok yang kedua adalah *children of the street*, yaitu anak-anak yang bekerja dan bermukim di sembarang tempat di jalanan, seperti emperan toko, pasar, terminal, dan sebagainya. Kelompok ini biasanya sudah tidak pernah atau tidak mempunyai kontak lagi dengan orang tua dan atau keluarganya.

Anak jalanan juga dapat dikelompokkan menurut usia. Beberapa pemikiran hasil kutipan Suswandari (2000: 18) di antaranya menurut *The Age Convention on The Right of The Child 1989* anak adalah individu yang berusia 18 ke bawah. Menurut UNICEF anak jalanan adalah anak yang berusia kurang dari 16 tahun, telah melepaskan diri dari orang tua atau keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat terdekatnya, serta larut dengan kehidupan yang berpindah-pindah di

jalan. Untuk Indonesia (Undang-undang No. 4 Tahun 1979), anak adalah mereka yang berumur di bawah 21 tahun dan yang berusia antara 6 sampai 15 tahun (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia).

Kajian ini mengacu pendekatan dan analisis pendidikan (UUSPN No.2 tahun 1989, PP. No. 27, 28, 29, dan 30 tahun 1990). Oleh karena itu, anak jalan dibagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok Pra Sekolah dan Balita (Bayi di bawah lima tahun). Kelompok ini terdiri dari anak-anak yang berusia 5 tahun atau kurang. Kelompok yang kedua adalah anak-anak usia sekolah dasar (SD). Kelompok ini terdiri dari anak-anak yang berusia sekitar 6 sampai 12 tahun. Kelompok yang ketiga adalah anak-anak usia sekolah dasar (SLTP). Kelompok ini terdiri dari anak-anak yang berusia sekitar 13 sampai 15 tahun. Kelompok yang keempat adalah anak-anak usia sekolah dasar (SLTA). Kelompok ini terdiri dari anak-anak yang berusia sekitar 16 sampai 19 tahun.

Di samping itu, anak jalan dalam kajian ini mencakup seluruh anak yang melakukan pekerjaan mengamen dan atau meminta-minta di jalan-jalan, terutama di persimpangan jalan yang memiliki pengatur lampu lalu lintas (*traffic light*). Dengan demikian, anak jalan yang dimaksud di sini, baik yang termasuk kategori *children on* maupun *of the street* serta anak jalan yang tinggal di beberapa rumah-rumah singgah di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

PROFIL ANAK JALANAN, KASUS DI KOTA YOGYAKARTA DAN PERMASALAHANNYA

Kajian ini dilakukan melalui penelitian dengan cara wawancara yang mendalam dan pengamatan yang cermat kepada anak dan orang tua mereka

yang melakukan pekerjaan mengamen dan meminta-minta di jalan. Di samping itu, wawancara juga dilakukan kepada pemilik warung dan tukang becak yang mangkal di pinggir jalan tempat beroperasinya anak jalanan. Data berkaitan dengan respon masyarakat juga digali melalui beberapa tokoh masyarakat tempat keluarga anak jalanan tersebut tinggal. Demikian pula, informasi berkaitan dengan upaya pembinaan anak jalanan tersebut juga digali melalui wawancara dengan pihak pengelola rumah singgah.

Secara garis besar, anak jalanan di kota Yogyakarta beroperasi di persimpangan jalan terutama yang memiliki lampu pengatur lalu lintas sejak pagi (dimulai sekitar pukul 09.00 WIB) sampai malam hari (sekitar pukul 21.00 WIB). Anak jalanan terdiri dari laki-laki ataupun perempuan. Pada umumnya mereka melakukan pekerjaan meminta-minta dan atau mengamen dengan membawa gitar atau menggunakan alat musik sederhana buatan sendiri. Sebagian dari mereka beroperasi bersama-sama dengan orang tua mereka, terutama sang ibu dan sebagian lainnya bersama-sama teman-temannya. Pada saat mengamen atau meminta-minta beberapa anak terlihat membawa kotak kardus atau botol bekas tempat air minum kemasan.

Mereka beroperasi di setiap ruas dengan arus yang cukup ramai, baik perempatan ataupun pertigaan jalan yang umumnya dilengkapi dengan lampu pengatur lalu lintas. Di setiap ruas tersebut, jumlah anak jalanan biasanya secara bersama-sama mencapai sekitar 3 sampai 10 orang di samping ada sebanyak 2 sampai 5 orang tua yang juga melakukan pekerjaan yang sama. Penampilan anak maupun orang tua jalanan tersebut biasanya berpakaian lusuh dan badan cukup kotor, yang tampaknya dengan maksud "menjual belas kasihan" kepada para pengguna jalan raya yang melewatinya.

Usia anak juga beragam, mulai dari kurang dari 1 tahun sampai usia sekitar 18 tahun. Anak yang berusia kurang dari 3 tahun pada umumnya

digendong oleh sang ibu sambil mengamen dan atau meminta-minta. Anak yang telah berusia sekitar 3 sampai 5 tahun tampak ditempatkan pada marka jalan, mereka duduk-duduk, bermain, maupun melihat arus lalu lintas atau memperhatikan sang ibu melakukan pekerjaannya. Bagi anak yang bersama-sama dengan orang tua setelah usia menginjak sekitar 6 sampai 12 tahun, anak telah dapat melakukan sendiri pekerjaan mengamen dan atau meminta-minta pada ruas jalan yang satu sambil diawasi oleh ibu mereka pada ruas jalan yang lain. Bagi anak yang lain, pekerjaan mengamen dan atau meminta-minta tersebut dilakukan bersama teman-temannya ataupun berlangsung di antara orang tua lainnya. Perebutan tempat mangkal tidak terjadi di antara mereka.

Di sela-sela melakukan pekerjaan mengamen atau meminta-minta tersebut mereka terlihat melakukan aktivitasnya sambil duduk dengan suasana senda gurau atau perbincangan di antara sesama anak ataupun antara anak dengan para orang tua jalanan terjadi, baik di marka jalan maupun di pinggir jalan yang memang cukup luas untuk duduk-duduk atau mondar-mandir dan cukup teduh dari terik matahari. Fakta ini menunjukkan bahwa kondisi fisik jalan maupun lingkungan di sekitarnya cukup nyaman bagi anak jalanan. Di samping itu, pendidikan sejak dini tentang kehidupan di jalan telah dimulai pada anak, baik melalui orang tua maupun melalui saling berinteraksi dengan teman-teman mereka. Dengan kata lain, kehidupan jalanan yang serba bebas, menyenangkan, memperoleh uang dengan mudah, cepat, serta tidak terikat dan diatur oleh siapapun telah dikenal anak sejak kecil.

Apabila ditanya faktor penyebab utama anak-anak dan orang-tua tersebut turun ke jalan adalah kesulitan ekonomi, faktor kemalasan diyakini merupakan salah satu faktor dominan. Di samping itu, adanya sebagian warga masyarakat pengguna lalu lintas yang memberi uang,

diduga kuat juga merupakan daya tarik anak untuk tetap memilih pekerjaan mengamen dan atau meminta-minta di jalanan tersebut. Menurut pengakuan meski tidak pasti, setiap anak per hari mampu mendapat uang antara Rp7.500,- sampai Rp 15.000,-. Kenyataan tersebut didukung oleh pernyataan para pemilik warung dan tukang becak yang mangkal di pinggir jalan bahwa di samping menu (jajan mereka) makan para anak dan orang jalanan tersebut jauh lebih baik dibanding orang biasa. Hal tersebut mengingat setiap keluarga jalanan setiap hari rata-rata dapat berpenghasilan antara Rp 30.000,- sampai Rp 50.000,-.

Realitas tersebut memperkuat masih berlakunya peribahasa “Ada gula ada semut” di jalan. Dengan kata lain, selama masih ada orang yang memberi uang, barang, dan atau bahan kebutuhan hidup lainnya di jalan diduga kuat akan tetap menjadi sebab maraknya anak (maupun orang tua) yang melakukan pekerjaan mengamen dan atau meminta-minta di jalan. Asumsi tersebut juga senada dengan kendala yang dihadapi pihak pengelola rumah singgah. Beberapa warga masyarakat pengguna jalan raya yang memberi uang kepada anak dan atau orang tua jalanan tersebut berdasarkan rasa iba terhadap penampilan mereka yang lusuh dan kumuh. Warga pengguna lalu lintas meyakini betul bahwa anak dan orang tua jalanan tersebut betul-betul miskin dan memang pantas dikasihani. Dengan demikian, upaya anak jalanan dalam menjual kasihan tersebut dapat dikatakan cukup berhasil. Di samping itu, sebagian pengguna jalan raya terutama bagi pengendara mobil yang kondisinya cukup bagus menyatakan rasa takutnya kepada anak jalanan atas kemungkinan terjadinya kerusakan pada kendaraannya apabila tidak memberi uang.

Pengelola rumah singgah mengirim anak usia SD atau SLTP ke sekolah-sekolah yang mau memberi keringanan biaya agar anak-anak tersebut dapat bersekolah. Bagi anak yang telah berusia SLTA, mereka

dikirim atau diikutkan ke lembaga-lembaga kursus yang mau memberikan keringanan untuk mengikuti latihan keterampilan. Para pengelola rumah singgah menyatakan bahwa meski SPP dan pakaian seragam dibantu, namun para anak-anak tersebut sangat sulit diajak agar tidak turun ke jalan. Kesabaran, kasih sayang, serta perlakuan yang lemah lembut harus selalu dilakukan dalam pendekatan kepada anak jalanan tersebut. Kesalahan sikap, perkataan, atau perilaku sedikit saja dari pihak pengelola akan membuat anak lari dan keluar dari rumah singgah. Pihak pengelola rumah singgah menyatakan bahwa dana operasional berasal dari pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan beberapa donatur masih sangat terbatas.

Berkaitan dengan permasalahan anak jalanan di Yogyakarta ini keterlibatan dunia pendidikan khususnya pihak sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi terlihat masih sangat terbatas dan seporadis. Pihak sekolah terkesan ikut berpartisipasi menangani anak jalanan apabila diminta oleh pihak pengelola rumah singgah. Demikian pula peran pihak perguruan tinggi masih sangat terbatas berkaitan dengan bentuk mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir sebagian kecil mahasiswanya, baik berupa skripsi pada jenjang S1 atau penulisan thesis untuk jenjang S2. Keterlibatan dunia pendidikan berkaitan dengan penanganan masalah anak jalanan ini tidak atau belum menyentuh aspek sistem, bentuk, metode, pendekatan, substansi, materi, proses, atau pendanaannya. Demikian pula, peran atau keterlibatan pihak tokoh maupun warga masyarakat dapat dikatakan masih sangat minim. Salah seorang tokoh masyarakat di kampung Kledokan, Sapen, Gondokusuman, Yogyakarta mengatakan bahwa masyarakat di wilayah tersebut tidak bersedia bergaul dengan anak maupun orang tua jalanan. Hal tersebut mengingat anak dan orang jalanan tersebut sulit diatur, tidak merasa malu

melakukan pekerjaan mengamen atau meminta-minta yang sebenarnya tergolong hina (bahasa Jawa “asor”) sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh tidak baik kepada warga. Dengan kata lain, persepsi sebagian tokoh dan warga masyarakat termasuk para pengguna jalan raya bahwa keberadaan anak jalanan sebagai sumber masalah dan kekacauan terhadap ketertiban umum tampak ada benarnya.

KETERPADUAN MANAJEMEN PEMBINAAN ANAK JALANAN DALAM

PERSPEKTIF PENDIDIKAN

Kecuali masih adanya sebagian warga masyarakat pengguna jalan raya yang memberi uang, kondisi fisik jalan juga diyakini merupakan faktor utama penyebab mengapa anak-anak melakukan pekerjaan mengamen dan atau meminta-minta di jalan. Dengan demikian, di samping rekayasa fisik jalan dan koordinasi berbagai pihak, program pembinaan untuk mengatasi masalah anak jalanan ini diharapkan dapat merupakan gerakan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi fisik jalan yang “tidak nyaman” untuk mondar-mandir, seperti marka jalan dibuat sangat sempit atau berpagar bahkan “membahayakan keselamatan” bagi para pengamen dan atau peminta-minta serta tidak adanya pemakai jalan yang memberi uang diyakini akan membuat bosan bagi anak-anak maupun orang jalanan.

Di samping itu, sikap mental dan moral “malas” untuk bekerja keras yang telah mulai melekat pada diri anak diduga merupakan salah satu kunci utama anak-anak (dan orang tua jalanan) melakukan pekerjaan mengamen dan atau meminta-minta di jalan. Anak sejak kecil sudah

mengenal dengan kehidupan dengan inti mencari uang serba bebas, tidak diatur-atur, dan dalam suasana yang cukup menyenangkan.

Dengan demikian, dalam pembinaan pada anak jalanan yang dilakukan dituntut agar mampu mengadakan perubahan pola pikir, sikap mental, dan pada akhirnya mengubah perilaku ke arah yang positif. Oleh karenanya, pendekatan pendidikan diperlukan di dalam membina dan mengatasi masalah anak jalanan. Konsep tersebut sejalan dengan inti pendidikan adalah pembudayaan manusia sehingga secara bertahap diyakini akan mampu meningkatkan kesadaran, mental, maupun moral anak khususnya dalam menumbuhkan “rasa malu” apabila melakukan pekerjaan sebagai peminta-minta dan atau pengamen di jalan raya.

Secara konseptual pola pembinaan yang menitikberatkan pendekatan yang mendidik serta disesuaikan dengan usia anak-anak jalanan yang dimaksud dipaparkan sebagai berikut.

1. Anak Kelompok Usia Balita dan Taman Kanak-kanak

Pada anak yang berusia 5 tahun atau kurang yang biasanya diajak atau digendong sang ibu sambil melakukan pekerjaan mengamen dan atau meminta-minta di jalan, pola pembinaan sebaiknya dilakukan melalui pemberdayaan sang ibu atau keluarga. Inti dari pola pembinaan ini adalah mengusahakan agar ibu atau orang tua anak yang bersangkutan meninggalkan kebiasaan yang tidak baik tersebut dan beralih kepada kegiatan ekonomi produktif. Anak yang berusia sekitar 5 tahun idealnya diikutkan belajar pada Taman Bermain (*Play Group*) atau sekolah TK. Namun apabila hal ini tidak memungkinkan, program pemberdayaan orang tua dan keluarga kiranya dirasa cukup memadai. Program inipun menghendaki kerjasama

antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan berbagai pihak seperti LSM yang selama telah peduli terhadap masalah anak dan orang-orang jalanan, warga dan tokoh masyarakat seperti ketua RT, RW, PKK tempat tinggal keluarga anak jalanan yang bersangkutan, Koperasi, Bank, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, maupun lembaga kursus keterampilan (LPK).

Konsep ini didasarkan atas fakta bahwa anak-anak yang berusia balita dan usia TK cukup banyak. Apabila setiap hari anak diajak mengamen dan atau meminta-minta di jalan; proses apresiasi maupun sosialisasi dan internalisasi akan terjadi dalam diri anak (Piaget melalui Kopperswamy, 1980: 124-125) baik melalui kawan-kawan sebaya, anak-anak yang lebih dewasa, maupun orang-orang tua termasuk ayah dan ibu mereka.

2. Anak kelompok Usia SD

Anak jalanan yang berusia antara 6 sampai 12 tahun pada umumnya telah dilepas oleh orang tua baik di bawah pengawasan ataupun melakukan sendiri bersama-sama anak sebayanya di dalam mengamen dan atau meminta-minta di jalan. Anak yang telah berusia sekitar 5 tahun (bahkan sejak 2 tahun) mulai mampu mencerna contoh kongkret atas sikap maupun perilaku orang tua maupun kawan-kawan mereka yang lebih dewasa di jalan raya. Selanjutnya pada usia 6-12 tahun (*Concrete and Formal Operation Stage*), anak sudah mulai dapat meniru dan bahkan mulai dapat mengembangkan dengan menambah atau mengurangi segala sesuatu yang dilihat termasuk di dalam membuat dan mengoperasikan alat musik sederhana di dalam melakukan kegiatan mengamen dan atau meminta-minta di jalan raya. Pengalaman hidup yang kurang baik tersebut apabila tidak ada upaya pembinaan diyakini terus berkembang yang selanjutnya

membentuk kebiasaan dan budaya pada diri anak (Ki Hajar Dewantoro, 1976: 17).

Oleh karena itu, pola pembinaan bagi kelompok usia ini sedapat mungkin diusahakan agar anak dapat mengikuti pendidikan pada jenjang SD. Pendekatan atau metode pembelajarannya agar tidak membosankan bagi anak terutama bagi anak jalanan ini. Di samping itu, suasana sekolah perlu dibentuk agar kondusif terbentuk kebersamaan, saling menghargai, menghormati, dan agar tidak cenderung mengejek atau mengisolir anak jalanan diikutkan belajar. Di samping itu isi pelajaran menurut kurikulum yang berlaku, muatan lokal maupun pendidikan ketrampilan dasar dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya agar dikembangkan sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan siswa khususnya bagi anak jalanan yang ikut pada sekolah tersebut.

3. Anak Kelompok Usia SLTP

Setelah berusia 13 tahun atau lebih (Piaget melalui Kopperswamy, 1980: 127) anak telah mulai dapat mengembangkan pemikiran dari hal-hal yang kongkret ke hal-hal yang abstrak. Melalui senda gurau, berkomunikasi, dan berinteraksi secara bebas, ataupun dalam suasana santai dengan sesama teman sebaya maupun dengan orang-orang yang lebih dewasa serta merupakan suasana yang mendominasi kehidupan mereka di jalan, tidak mustahil kebiasaan dan perilaku anak jalanan menjadi semakin berani atau tidak merasa malu melakukan pekerjaan mengamen dan atau meminta-minta di jalan tersebut.

Seperti pada anak usia SD dan sejalan dengan program wajib belajar 9 tahun, anak jalanan yang berusia antara 12 sampai 15 tahun

dan telah tamat SD sebaiknya diberi kesempatan mengikuti pendidikan pada jenjang SLTP. Suasana sekolah diusahakan agar kondusif dan terbentuk kebersamaan, saling menghargai, menghormati, tidak cenderung menghina atau mengisolir anak jalanan diikutkan belajar pada sekolah tersebut. Di samping itu, isi pelajaran menurut kurikulum yang berlaku, muatan lokal maupun pendidikan keterampilan atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya agar sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan masyarakat maupun seluruh siswa terutama anak jalanan yang bersangkutan.

4. Anak Kelompok Usia SLTA

Menginjak usia sekitar 17 tahun anak telah beranjak dewasa terutama laki-laki yang secara fisik sudah mulai cukup kuat sehingga terlebih bersama-sama dengan teman sebayanya anak paling tidak terlihat sudah mulai merokok dan sebagian lainnya berperilaku serta berpakaian dan menata rambutnya “nyentrik” (aneh-aneh). Tidak mustahil apabila pembinaan tidak dilakukan, anak jalanan akan mulai berani bertindak merugikan orang lain termasuk merusak kendaraan para pengguna jalan apabila tidak diberi uang maupun mengganggu ketertiban umum lainnya.

Dengan demikian, pembinaan mutlak diperlukan bagi anak jalanan kelompok usia ini. Namun, sejalan dengan kemampuan dana baik pihak pemerintah dan masyarakat diyakini terbatas, pola pembinaan yang dimaksud tidak perlu berupa mengirim anak-anak jalanan tersebut untuk mengikuti pendidikan formal SMU ataupun SMK. Program pendidikan dan pelatihan keterampilan termasuk menyangkut aspek moral dan mental berusaha sehingga diharapkan mampu mengarahkan kepada sikap dan keberanian, dan kemampuan berwirausaha diyakini merupakan alternatif terbaik.

Kegiatan dimulai dengan mengidentifikasi anak-anak jalanan kelompok usia ini menyangkut nama, usia, jenis kelamin, tempat tinggal atau alamat, asal daerah, minat, bakat, pengalaman, dan latar belakang keluarganya. Melalui pendekatan yang sesuai dalam arti tidak memaksa maupun dengan cara kekerasan lainnya, program diklat ini ditawarkan kepada mereka sambil program rekrutmen dilakukan. Bagi yang bersedia dan mau mengikuti, proses pelatihan dan pembelajaran dilaksanakan oleh pemda sebagai motor dan koordinator dan bekerja sama dengan LPK, SMK, maupun perguruan tinggi termasuk menyangkut perencanaan, materi pelatihan, sistem evaluasi, pendanaan, dan menyangkut aspek lainnya.

Setelah program pelatihan selesai, bekal usaha baik berupa peralatan kerja maupun modal untuk berusaha apabila perlu dapat diberikan bagi peserta yang berkeinginan untuk berwirausaha. Bagi kelompok ini tentu saja bimbingan, pendampingan terutama menyangkut masalah pemasaran produk hendaknya tetap dilakukan di samping termasuk dalam upaya mengevaluasi efektivitas program. Sedangkan bagi kelompok yang belum bisa mandiri, kesempatan kerja kiranya perlu diusahakan melalui kerja sama dengan para pengusaha atau pihak swasta lainnya.

5. Koordinasi dan Kerjasama Berbagai Pihak

Karakteristik dan permasalahan anak jalanan yang khas dengan ciri utama keinginan untuk serba bebas, kompleks, dan pemecahan yang membutuhkan dana yang tidak sedikit menghendaki pendekatan yang mendidik serta manajemen yang sesuai. Dengan demikian, koordinasi dan kerjasama antara pemda dengan berbagai pihak mutlak diperlukan. Garukan, kekerasan, atau bentuk pemaksaan lainnya diyakini tidak

akan memecahkan masalah. Pembinaan yang perlu dilakukan pada prinsipnya menciptakan suasana, baik fisik maupun sosial yang membuat anak tidak betah turun ke jalan untuk melakukan pekerjaan mengamen dan atau meminta-minta.

Keadaan fisik jalan yang tidak nyaman serta masyarakat pengguna jalan yang tidak lagi memberi uang diyakini mau-tidak mau akan mengubah pola sikap, pikir, perilaku yang serba pesimistis, konsumtif, serta pasrah, dan kebiasaan turun ke jalan paling tidak diharapkan menjadi mempunyai keinginan untuk mengikuti program pembinaan yang ditawarkan. Berangkat dari hal tersebut setelah mengikuti pelatihan selanjutnya akan terbentuk budaya yang positif (Pujiwati Sayoga, 1991: 2) yang ditandai oleh optimistis, kreatif, inovatif, ulet, bekerja keras, dan produktif.

Keyakinan tersebut berlandaskan pada konsep bahwa semua keputusan yang diambil setiap individu khususnya orang dewasa dilatar belakangi oleh pandangan dan pendapat atau persepsi yang bersangkutan terhadap suatu masalah. Bagi seorang anak; sikap, pendapat, dan perilaku berkaitan dengan suatu masalah juga dipengaruhi oleh bimbingan termasuk yang berasal dari suatu program pelatihan (Koentjoroningrat, 1986: 27). Asumsi ini juga sinkron dengan salah satu tugas utama pendidikan adalah sebagai transformator budaya (Sastrohamijaya, 1985: 53).

Di samping itu, koordinasi dan kerjasama berbagai pihak diharapkan juga mampu meningkatkan kesadaran, kepekaan, dan kepedulian, atau mendidik mereka untuk ikut berpartisipasi memecahkan permasalahan yang ada di wilayahnya termasuk persoalan anak jalanan ini. Dengan demikian, program pembinaan yang dimaksud diyakini akan lebih sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan. Koordinasi dan kerja sama diyakini juga akan bermanfaat terutama menyangkut masalah

pendanaan yang sampai saat ini kecuali sangat terbatas, diduga juga kurang efisien, efektif, dan tidak terarah.

Melalui program yang sistematis ini, penggalan dana termasuk dengan pihak pengguna jalan berubah dari bentuk memberi uang di jalan kemudian diarahkan dan dikumpulkan kepada lembaga sosial yang ada atau akan dibentuk oleh pemda dan masyarakat, mulai dari tingkat dusun/kampung sampai tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan seterusnya sampai tingkat kabupaten. Dengan kata lain, sistem manajemen pendanaan program diyakini akan dapat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Konsep ini kiranya juga sejalan dengan era otonomi daerah.

Berkaitan dengan kekhawatiran atau kecemasan pihak pengguna jalan terhadap kemungkinan akan dirusaknya kendaraan mereka apabila tidak memberi uang, pihak kepolisian kiranya juga perlu dilibatkan dalam program ini. Hal ini diyakini tidak sulit mengingat selama ini di setiap persimpangan jalan telah ada petugas kepolisian. Oleh karenanya petugas diharapkan ikut mencermati tangan-tangan jahil anak jalanan yang kemungkinan berbuat anarkhis terhadap kendaraan pengguna jalan yang tidak memberi uang. Sekaligus dengan demikian program ini juga dalam rangka menerapkan dan menegakkan hukum maupun aturan yang berlaku di jalan raya.

Terhadap anak jalanan yang oleh karena kemalasan serta tidak mau dibina, larangan (dari pemerintah) untuk mengamen dan atau meminta-minta di jalan tidak perlu diadakan. Rekayasa fisik di jalan dan kampanye atau himbauan, jika perlu larangan berupa tulisan untuk tidak memberi uang kepada anak jalanan dari pihak pengguna jalan pada tempat-tempat strategis serta persimpangan jalan perlu diadakan. Di samping itu, bagian jalan yang dipergunakan untuk

duduk-duduk, bersenda gurau, hilir mudik agar dibuat “tidak nyaman”, seperti diberi pagar atau bentuk lainnya. Untuk itu kerjasama dengan pihak pemda khususnya Dinas Kimpraswil juga perlu dilakukan.

KESIMPULAN

Anak jalanan bagaimanapun juga adalah bagian dari generasi muda yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, upaya pembinaan dan pemecahannya menjadi tanggung jawab semua elemen, seperti tokoh masyarakat tempat asal anak, tempat tinggal anak, para pengguna jalan, maupun berbagai institusi baik negeri maupun swasta termasuk perguruan tinggi. Keterlibatan yang dimaksud di antaranya mencakup bantuan terhadap pola rekrutmen, pengembangan program, evaluasi, tidak lanjut penyempurnaan, maupun berkaitan dengan masalah pendanaannya.

Sebagai kelengkapan manajemen pembinaan anak jalanan yang diusulkan ini, terutama dalam rangka merekrut peserta didik, identifikasi tentang asal daerah, keinginan, faktor penyebab, usia, status sekolah, dan tempat tinggal segera dilakukan. Kepada anak jalanan yang permasalahan obyektifnya berkaitan dengan kesulitan ekonomi serta berkeinginan untuk memperbaiki diri dan mau dibina, pelatihan atau pendidikan segera dapat dilaksanakan. Perekrutan dilakukan terhadap anak jalanan yang benar-benar disebabkan oleh faktor kesulitan ekonomi, mau dibina, dan berkeinginan untuk memperbaiki diri dan masa depan.

Terhadap anak jalanan yang tidak mau dibina serta penyebab utamanya adalah faktor kemalasan, tidak mau diatur dan cenderung “liar”, larangan sebaiknya tidak perlu diberlakukan. Kecuali himbauan terus menerus oleh berbagai pihak terutama yang dekat dengan mereka, himbauan terhadap khususnya para pengguna jalan agar tidak memberi uang kepada

mereka di jalan perlu dikembangkan. Himbauan yang dimaksud secara terpadu dalam arti merupakan gerakan kampanye di seluruh wilayah dan kampung atau desa-desa, juga berupa tulisan yang dipampang di tempat-tempat strategis termasuk tempat-tempat mangkalnya anak jalanan,

Kepada perguruan tinggi kecuali berkaitan dengan kemungkinan *sharing* tentang dana, materi, model pembelajaran dan pelatihan, sistem evaluasi, upaya tindak lanjut, dan program penyempurnaan dapat dikoordinasikan atau dapat dimintakan bantuannya. Ruas-ruas jalan tempat beroperasi anak perlu diusahakan tidak nyaman bagi mereka serta pengembangan budaya tertib dan penegakan hukum juga diperlukan terhadap kemungkinan terjadinya perbuatan anarkhis dan merusak oleh anak jalanan baik terhadap kendaraan para pengguna jalan maupun fasilitas dan sarana umum.

Sebagai bagian dari sistem pembinaan serta tindak lanjutnya, kerja sama dengan dan bantuan pihak industri atau pengusaha maupun departemen tenaga kerja kiranya juga sangat diperlukan. Kontribusi yang dimaksud di antaranya adalah berupa pelatihan manajemen, pemasaran hasil karya dan kerajinan anak jalanan dan atau apabila memungkinkan menampung atau memperkerjakan mereka setelah mendapat pelatihan yang memadai terutama bagi yang tidak memiliki bakat sebagai wirausahawan.

DAFTAR PUSTAKA

Biro Pusat Statistis. (1995). *Strategi Angkatan Kerja Indonesia 1994*. Jakarta: BPS.

_____. (1994). *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: BPS.

Fergus, D. D., dkk. (1995). *Situasi dan Masalah Sumber Daya Manusia di Indonesia*, Jakarta: Gramedia.

Ki Hajar Dewantoro. (1976). *Pendidikan dan Pembangunan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.

_____. (1976). *Kebudayaan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.

Koentjoroningrat. (1984). *Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.

Moeis, J, dkk. (1995). *Profil Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Murtopo, A. (1976). *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: Gramedia.

Pasay, H., dkk. (1995). *Produktivitas, Sumber Daya manusia, dan Teknologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Suryadi, A. (1994), *Hubungan antara Pendidikan, Ekonomi dan Ketenagakerjaan dalam Ciri Demografis Kualitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: LDFEUI.

Tjiptoherijanto, P. (1994). *Pelatihan dan Ketrampilan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia.